

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi ini didasarkan atas kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini mendasari masa depan organisasi bergantung pada apakah organisasi tersebut memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atau tidak. Organisasi tersebut menjalankan operasionalnya, dimana perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus memerhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Deegan, 2002). Teori legitimasi didasarkan oleh persepsi, tetapi persepsi saja tidak cukup. Mereka harus melakukan tindakan bertanggung jawab sosial didukung dengan pengungkapan, mempublikasikan, dan melaporkan dalam laporan tahunan perusahaan (Magness, 2006).

Teori legitimasi ini sangat penting karena kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Hubungan yang baik adalah menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat melalui kontrak sosial. Kontrak tersebut berupa kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan melaksanakan kontrak tersebut seperti *environmental disclosures*, menjalankan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Dengan melakukan hal tersebut, maka masa depan perusahaan akan menjadi baik dan bermanfaat untuk jangka panjang (Oktafianti dan Rizki, 2015).

Teori legitimasi menyebutkan bahwa legitimasi merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis, perhatian dan pengembangan kinerja karyawan, dampak terhadap lingkungan perusahaan turut berkontribusi dalam meningkatkan legitimasi. Dengan demikian maka kepedulian perusahaan terhadap lingkungan yang kemudian ditunjukkan melalui *environmental disclosures*, diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan berdampak baik untuk jangka panjang perusahaan.

2. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang dilandasi dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung risiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Jensen and Meckling, 1976). Menurut Brigham dan Daves (2010), hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih yang disebut prinsipal melimpahkan tanggung jawab ke individu lain atau organisasi yang disebut agen untuk melaksanakan pekerjaan serta pengambilan keputusan. Di sisi lain manajer memiliki tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hal inilah yang menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut dengan teori agen (*agency theory*).

Manajer yang memiliki saham yang tinggi dalam suatu perusahaan akan lebih menyelaraskan kepentingannya dan kepentingan pemegang saham. Maka dari itu, ia akan bekerja lebih produktif untuk meningkatkan

citra perusahaan demi keberlangsungan hidup perusahaan dan demi kesejahteraan pemegang saham. Hal ini mendorong manajer untuk memberikan informasi yang relevan terhadap *stakeholders* dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih luas termasuk dalam pengungkapan informasi lingkungan. Dengan demikian perusahaan dapat memiliki citra yang baik di mata masyarakat atas pengelolaan yang baik terhadap lingkungan (Raharjo, 2007).

3. Teori *stakeholders*

Menurut Huang dan Kung (2017), teori *stakeholders* menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Dalam teori *stakeholders* menyatakan tentang bagaimana pemegang saham dan manajer menciptakan nilai. Interaksi antara *stakeholders* dengan perusahaan merupakan hubungan timbal balik. *Stakeholders* menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan perusahaan sedangkan perusahaan memenuhi tuntutan dari *stakeholders*.

Menurut Freeman dan Veal (2001), teori *stakeholders* menyatakan bahwa *stakeholders* berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan semua aktivitas perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh *stakeholders*. Dengan teori *stakeholders* semua aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar perusahaan yang semuanya bertujuan untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Dengan dukungan *stakeholders* yang kuat maka kelangsungan hidup perusahaan akan terjaga.

Teori ini berhubungan dengan *environmental disclosures*, jika dukungan *stakeholders* kuat terhadap aktivitas perusahaan, maka semakin tinggi pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. Fatayaningrum (2011) mengungkapkan beberapa alasan pentingnya mengutamakan kepentingan *stakeholders* adalah :

- a. Isu lingkungan oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan mengganggu kehidupan masyarakat.
- b. Ketika mengeluarkan produknya perusahaan dituntut untuk memerhatikan aspek lingkungan akibat dari pengeluaran produk tersebut.
- c. Untuk menanamkan sahamnya para investor lebih memilih perusahaan yang memerhatikan aspek lingkungan dan pengungkapan sosial.

Stakeholders memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda, mengenai bagaimana menjalankan operasi perusahaan. *Stakeholders* menjalankan kontrak sosial dengan *stakeholders* lain yang memiliki kepentingan yang berbeda (Huang dan Kung, 2017). Menurut Donaldson dan Preston (1995), *environmental disclosures* dianggap menjadi cara bagi perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan bagi pemangku kepentingan lain.

4. *Environmental Disclosures*

Peranan yang dimiliki akuntansi adalah mengendalikan semua aktivitas jalannya operasi perusahaan. Manajemen harus memerhatikan dampak akibat aktivitas operasi perusahaan terutama dampak langsung yang

berkaitan dengan lingkungan. Jika manajemen tidak memerhatikan dampak mengenai lingkungan maka akan timbul berbagai macam konflik pada suatu kelompok dan kelompok lainnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi konflik tersebut perusahaan mengupayakan pengungkapan terkait dengan informasi yang mencakup semua aktivitas operasi perusahaan. Informasi tersebut mengenai aktivitas yang berkaitan langsung dengan lingkungan yang diungkapkan dalam *annual report* perusahaan.

Pengungkapan (*disclosures*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian optimal pasar modal secara efisien. Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan (Suwardjono, 2005). Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan. *Disclosures* yang luas dibutuhkan oleh para pengguna informasi khususnya investor dan kreditor, namun tidak semua informasi perusahaan diungkapkan secara detail dan transparan.

Disclosures dibagi menjadi dua yaitu : *mandatory disclosures* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosures* (pengungkapan sukarela). *Mandatory disclosures* adalah pengungkapan informasi yang bersifat wajib berkaitan dengan semua aktivitas perusahaan yang dituangkan dalam *annual report* perusahaan. Pengungkapan ini bersifat wajib karena dinyatakan dalam peraturan hukum. *Voluntary disclosures* adalah pengungkapan informasi yang terkait dengan aktifitas operasi perusahaan yang

diungkapkan secara sukarela (Suwardjono, 2005). Perusahaan diperbolehkan untuk tidak melakukan pengungkapan, maka tidak diwajibkan untuk melakukan pengungkapan, hal ini disebabkan karena tidak ada peraturan hukum yang mewajibkan.

Environmental disclosures adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan informasi lingkungan perusahaan bertujuan sebagai media untuk mengomunikasikan realitas untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politis. Pertanggungjawaban lingkungan hidup juga merupakan respon terhadap kebutuhan informasi dari berbagai kelompok yang berkepentingan (*interest groups*) seperti serikat pekerja, aktivis lingkungan hidup, kalangan religius dan kelompok lain (Guthrie dan Parker, 1990).

Dalam *annual report*, perusahaan mengungkapkan informasi lingkungan berupa dalam bentuk pernyataan secara kualitatif, asersi, serta fakta kuantitatif dalam bentuk *annual report* perusahaan (Al-Tuwaijri *et al.*, 2004). *Environmental disclosures* merupakan bagian dari *corporate social responsibility disclosures (CSR)* serta *sustainability report*. Melalui penerapan *environmental disclosures* di perusahaan, maka semua aktivitas operasi perusahaan akan menjadi panutan para *stakeholders* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Maka dari itu, apabila *environmental disclosures* dilaksanakan, maka perusahaan akan mendapat citra yang baik di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat memberikan

dukungan dan rasa percaya terhadap perusahaan. Hal ini dapat menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan.

Menurut Nik dan Sulaiman (2004), *environmental disclosures* yang dilakukan perusahaan-perusahaan pada negara-negara maju dan negara-negara berkembang tidak dapat digeneralisasikan karena adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi pada negara-negara tersebut. Termasuk di negara Malaysia *environmental disclosures* masih bersifat sukarela (*voluntary disclosures*) (Buniamin, 2010). *Environmental disclosures* di Indonesia juga masih bersifat sukarela (*voluntary disclosures*) (Suhardjanto, 2008). Roberts (1992), menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada standar pelaporan kinerja sosial dan lingkungan yang diterima secara umum, sehingga belum ada standar baku yang berlaku secara internasional tentang pengukuran dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan.

Jika merujuk pada *Global Reporting Initiative's (GRI 34)*, *environmental disclosures* mengungkapkan berbagai informasi terkait dengan aktivitas perusahaan yang berdampak langsung dengan lingkungan hidup serta upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. *Global Reporting Initiative's (GRI 34)* atau (G4) dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam melaporkan kinerja yang mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosial. *GRI* dapat digunakan oleh berbagai jenis sektor perusahaan, ukuran serta lokasi yang berbeda (*Global Reporting Initiative, 2015*).

Global Reporting Initiative's digunakan untuk mengukur *environmental disclosures* dengan menggunakan *checklist* yang berpedoman pada *GRI*. *GRI* memuat 34 indikator pengungkapan, kemudian dicocokkan dengan *annual report* perusahaan. Dari 34 indikator pengungkapan tersebut merupakan penjabaran dari 12 aspek yaitu, energi, keanekaragaman hayati, emisi, air, produk dan jasa, *effluent* dan limbah, bahan baku, transportasi, lain-lain, *assesment* pemasok atas lingkungan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, dan kepatuhan.

5. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* adalah sistem yang mengatur jalannya operasional perusahaan yang terdiri dari pengelola perusahaan, pemegang saham, pemerintah, karyawan, dan kepentingan lainnya baik dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan memberikan kontribusi yang menjadi tujuan perusahaan (Restuningdiah, 2010).

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007), *corporate governance* berhubungan dengan masalah keagenan, yang memiliki fungsi untuk memberi keyakinan kepada prinsipal atau pemegang saham. Hubungannya adalah dana yang mereka investasikan tersebut akan memiliki timbal balik keuntungan yang akan didapat oleh pemegang saham. Gagasan utama tata kelola perusahaan yang baik adalah mampu mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak hanya peduli terhadap aspek sosial namun juga terhadap aspek lingkungan. Asas *Corporate Governance* diperlukan untuk

mencapai kesinambungan usaha dengan memperhatikan *stakeholders* yaitu (KNKG, 2006):

a. Transparansi

Penyediaan informasi yang memadai (material) akan menentukan objektivitas perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Selain itu, dibutuhkan informasi yang relevan yang diharapkan *stakeholders* dapat memahami dengan mudah segala bentuk informasi yang disampaikan oleh pihak bersangkutan.

b. Akuntabilitas

Pelaksanaan kegiatan perusahaan hendaknya dilanjutkan dengan proses tanggung jawab terkait kinerja perusahaan, sehingga disebut sebagai suatu proses yang mempunyai kesinambungan antara proses dan hasil. Termasuk apakah didalam pelaksanaan kegiatannya telah dilakukan dengan cara yang tepat, terukur, serta sesuai dengan kepentingan para *stakeholders*.

c. Bertanggung jawab

Mematuhi aturan perundangan merupakan hal yang mutlak dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan karena hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya yang berada di sekitar perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang memadai dan pengelolaan yang sistematis terhadap lingkungan.

d. Independen

Dalam melaksanakan asas *corporate governance*, pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan cara yang independen, artinya pengelolaan dilakukan tanpa adanya campur tangan dari pihak yang berkepentingan sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya dominasi pihak tertentu yang ingin memuluskan kepentingannya di dalam perusahaan.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Penting untuk memberikan penilaian terkait dengan kewajaran dan kesetaraan yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Lins dan Warnock (2004), mekanisme *corporate governance* diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal. Mekanisme tersebut seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*.

Mekanisme eksternal adalah cara memengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar. Beberapa mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris.

6. Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goodman (1999), kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen. Pemegang saham yakni pihak manajemen secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Kepemilikan manajerial akan berdampak positif bagi perusahaan karena dalam diri anggota manajemen timbul rasa memiliki saham di perusahaan. Jajaran manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan memiliki dua peran yakni, sebagai agen dan prinsipal. Atas hal tersebut, jajaran manajemen akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer (agen) dengan kepentingannya sebagai pemegang saham (prinsipal).

Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh manajer di perusahaan, maka kinerja manajer akan lebih produktif sehingga akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, sehingga perusahaan memiliki citra yang baik di masyarakat. Dalam hubungannya dengan *environmental disclosures*, manajer akan terdorong untuk melakukan pengungkapan melalui *environmental disclosures* dalam *annual report* perusahaan, karena untuk menjaga citra perusahaan yang telah dibangun (Oktafianti dan Rizki, 2015).

7. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Restuningdiah (2010), dewan komisaris memiliki peranan penting dalam *corporate governance* karena memiliki fungsi pengawasan

terhadap dewan direksi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil terhadap perusahaan. Banyaknya dewan komisaris di perusahaan dapat memengaruhi aktivitas setiap unit usaha yang dilakukan perusahaan, dengan jumlah dewan komisaris yang lebih besar maka dapat memperkecil adanya masalah asimetri informasi di dalam perusahaan.

Selain itu dengan dewan komisaris yang lebih banyak maka dapat memperkuat fungsi pengawasan manajemen perusahaan. Menurut Sanjaya (2013), dalam melakukan kegiatan bisnisnya perusahaan perlu melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut berguna untuk pengelolaan operasi perusahaan agar tetap transparan sehingga mendapat dukungan penuh dari *stakeholders*, serta dapat lebih mudah mengendalikan dan memonitoring *Chief Executives Officer (CEO)*. Dalam perusahaan jumlah anggota dewan komisaris harus lebih besar, hal ini dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana manajemen mendapat tekanan dari dewan komisaris sehingga terdorong untuk melakukan pengungkapan.

Dewan komisaris adalah bagian dari struktur organisasi perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Selain itu, bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (KNKG, 2006). Terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang berasal

dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2002) yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, yaitu:

a. Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*

Sistem satu tingkat berasal dari sistem hukum *anglo saxon*. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen (non direktur eksekutif) yang bekerja dengan prinsip paruh waktu. Negara-negara yang menggunakan *One Tier System* misalnya adalah Amerika Serikat dan Inggris termasuk Malaysia.

b. Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*

Sistem dua tingkat berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris juga bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menggunakan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang termasuk juga Indonesia.

Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosures* karena dewan komisaris mempunyai kepentingan terhadap

environmental disclosures. Maka dari itu, jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan bisa meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan pada perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan, maka informasi yang dihasilkan akan lebih lengkap dan lebih berkualitas termasuk informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan. Maka dari itu, semakin besar komposisi dewan komisaris didalam perusahaan maka semakin tinggi *environmental disclosures* yang dilakukan oleh perusahaan (Ningsih, 2017).

8. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dewan komisaris harus memiliki sejumlah jadwal rapat tetap dan jadwal rapat tambahan, hal ini sesuai dengan *Corporate Governance Guidelines* yang ditetapkan 12 September 2007. Agenda rapat dewan komisaris disusun bertujuan untuk mengawasi kinerja perusahaan secara berkala serta dapat mengevaluasi kinerja disetiap unit usaha, dan kebijakan perusahaan yang perlu diambil. Jika rapat dewan komisaris tidak berjalan efektif hal ini dapat mengakibatkan dominasi suara dalam rapat yang memungkinkan mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan perusahaan (Muntoro, 2006).

Salah satu kewajiban dewan komisaris adalah mengadakan rapat secara berkala hal ini penting dilakukan untuk menjalankan kebijakan dan keputusan perusahaan yang perlu diambil. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris yang diadakan didalam perusahaan dalam jangka waktu

satu tahun, hal ini akan meningkatkan kinerja perusahaan (Brick dan Chidambaran, 2007).

Menurut Xie *et al.* (2003), rapat dewan komisaris sebagai saran untuk memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan perusahaan yang diambil. Oleh karena itu, jika rapat dewan komisaris ini semakin sering dilaksanakan maka fungsi pengawasan dewan komisaris akan semakin efektif sehingga pelaksanaan *environmental disclosures* di perusahaan akan semakin luas.

9. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran mengenai skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur menggunakan kapitalisasi pasar, total modal yang dapat digunakan, total aktiva yang dimiliki dan total penjualan (Yahya *et al.*, 2007). Perusahaan yang memiliki ukuran besar tentu memiliki aktivitas yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran kecil, hal ini akan menimbulkan banyak dampak bagi pemegang saham dan masyarakat luas.

Perusahaan akan memikirkan dampak yang akan berpengaruh terhadap masyarakat dengan melaporkan mengenai kegiatan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak aktivitas yang telah ditimbulkan oleh perusahaan. Dengan pengungkapan informasi mengenai lingkungan diharapkan masyarakat dapat menilai perusahaan layak atau tidaknya dalam melakukan aktivitasnya.

Luo *et al.* (2013), menyatakan perusahaan besar akan mendapatkan tekanan besar dari publik dan para *stakeholders* mempunyai ekspektasi yang tinggi mengenai praktik manajemen karbon. Untuk menjawab tekanan tersebut cara yang dapat ditempuh perusahaan adalah dengan melakukan pengungkapan sosial lingkungan agar mendapatkan dukungan dari para *stakeholders* dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

10. Kinerja Keuangan

Menurut IAI (2007), kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimiliki, selain itu kinerja keuangan dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan suatu perusahaan. Selain itu kinerja keuangan juga dapat dijadikan pedoman oleh investor untuk menanamkan sahamnya ke perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja keuangan menggunakan proksi profitabilitas dan likuiditas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berhubungan dengan penjualan, beban dan laba/rugi. Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola sumberdaya perusahaan. Profitabilitas hubungannya dengan *environmental disclosures* adalah bahwa *disclosures* menjadi penting bagi perusahaan jika ingin mendapatkan laba yang dicapai. *Environmental disclosures* berperan sebagai alat untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat yang berguna untuk pencapaian laba perusahaan. Jika

perusahaan mendapat respon positif dari masyarakat maka citra perusahaan dimata masyarakat menjadi baik sehingga peluang untuk mendapat laba sesuai dengan keinginan perusahaan akan lebih mudah dicapai (Hackston dan Milne, 1996).

Menurut Elijido-Ten (2004), menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan melakukan *environmental disclosures* karena perusahaan memiliki sumber daya yang banyak untuk melakukan *environmental disclosures*. Tingkat profitabilitas rendah akan cenderung untuk tidak melakukan *environmental disclosures*, namun akan lebih berfokus pada perbaikan kinerja ekonomi perusahaan.

Likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Likuiditas juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka panjang. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar hutang-hutang jangka pendeknya (Kamil dan Herusetya, 2012).

Menurut Almilia *et al.* (2007), mengklasifikasikan likuiditas sebagai alat untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan. Kondisi perusahaan yang sehat, yang antara lain ditunjukkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Likuiditas berhubungan dengan pengungkapan didasarkan pada ekspektasi bahwa perusahaan yang secara keuangan kuat,

akan cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi. Karena ingin menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa perusahaan tersebut kredibel. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan yang lain bahwa mereka lebih baik daripada perusahaan lain dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Sinyal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang lebih luas tentang lingkungan melalui *environmental disclosures* (Kamil dan Herusetya, 2012).

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Environmental*

Disclosures

Environmental disclosures dinilai sebagai kebijakan yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Citra perusahaan yang meningkat tentu akan berdampak positif pula terhadap kepentingan manajer sebagai pemegang saham. Maka dari itu, *environmental disclosures* dapat dijadikan sebagai cara manajer untuk menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan sebagai pemegang saham (Oktafianti dan Rizki, 2015). Anggraini (2006) menemukan bahwa adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosures*. Hal ini karena semakin banyak kepemilikan manajemen di dalam perusahaan, manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan citra perusahaan.

Buniamin *et al.* (2010) di Malaysia kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*. Kepemilikan manajerial yang lebih rendah akan menghasilkan kecenderungan yang lebih besar untuk pelaporan lingkungan. Hal ini karena pelaporan lingkungan adalah bersifat sukarela, perusahaan tidak merasakan tekanan untuk melakukannya. Tarmizi (2012) menemukan terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosures*. Manajemen yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial.

Oktafianti dan Rizki (2015) menemukan adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosures*. Kepemilikan manajer yang semakin besar membuat manajer lebih memikirkan kepentingan dan kesejahteraan pemegang saham. Kinerjanya semakin produktif demi keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham, sehingga manajer akan memberikan informasi yang relevan bagi *stakeholders* yang lebih luas.

Manajemen yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham sehingga semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Selain itu pernyataan dari Fama dan Jensen (1983), jika kepemilikan

manajerial dalam suatu perusahaan tinggi, maka manajemen cenderung untuk melakukan *environmental disclosures*. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H_{1a} : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.

H_{1b} : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.

2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Environmental*

Disclosures

Arta dan Sari (2015) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan lingkungan. Hal ini karena semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer (CEO)* dan monitoring yang dilakukan semakin efektif. Maka dari itu, tekanan yang diberikan dalam melakukan pengungkapan informasi lingkungan semakin besar.

Penelitian dari Malaysia Haniffa dan Cooke (2002) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*. Seberapa banyaknya jumlah dewan komisaris perusahaan tidak akan seluruhnya akan memberikan perhatian terhadap pengungkapan lingkungan, sehingga dewan komisaris tidak ada urusan atau kepentingan terkait dengan pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian dari Frendy dan

Kusuma (2011) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *environmental disclosures*.

Htay (2012) menemukan ukuran dewan komisaris di Malaysia berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*, karena dengan jumlah dewan komisaris yang lebih banyak maka hubungan dengan organisasi dan direksi di luar perusahaan juga akan banyak maka perusahaan akan memberikan sumber informasi terkait dengan *environmental disclosures*.

Perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih banyak maka akan memiliki fungsi pengawasan yang kuat sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan akan lebih transparan dalam memberikan informasi bagi *stakeholders* maupun *shareholders*. Selain itu bagi pihak manajemen dapat meningkatkan fungsi pengawasan yang semakin kuat. Tekanan yang dihadapi akan semakin kuat sehingga dapat terdorong untuk melakukan *environmental disclosures* (Sembiring, 2005). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H_{2a} : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.

H_{2b} : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.

3. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap *Environmental*

Disclosures

Agenda rapat dewan komisaris disusun bertujuan untuk mengawasi kinerja perusahaan secara berkala serta dapat mengevaluasi kinerja disetiap unit usaha, dan keefektifan kebijakan perusahaan yang perlu diambil. Rapat dewan komisaris merupakan kewajiban dari dewan komisaris untuk menjalankan serangkaian keputusan bersama pada sejumlah rapat tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan.

Ariningtika *et al.* (2013) menemukan bahwa jumlah rapat dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Suhardjanto dan Permatasari (2010) menemukan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*, hal ini dapat diindikasikan bahwa peran rapat dewan komisaris belum sebagaimana yang diharapkan.

Xie *et al.* (2003) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Hal ini karena semakin sering dewan komisaris mengadakan pertemuan, maka akrual kelolaan perusahaan menjadi semakin kecil. Selain itu, Zulaikha dan Setyawan (2012) hasilnya bahwa adanya pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosures*.

Ariningtika *et al.* (2013) menyatakan bahwa rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang intensif untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi perusahaan. Menurut Brick dan

Chidambaran (2007), semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris yang dilakukan maka kinerja perusahaan semakin meningkat, sehingga berdampak pula pada pengungkapan informasi perusahaan dalam hal ini terkait dengan *environmental disclosures* oleh dewan komisaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H_{3a} : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.

H_{3b} : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Environmental Disclosures*

Menurut Suryono dan Prastiwi (2011), perusahaan yang lebih besar akan memiliki aktivitas dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Pemegang saham kemudian akan memerhatikan laporan keuangan terkait dengan aktivitas yang diinformasikan oleh pemegang saham. Ukuran perusahaan yang semakin besar maka pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan akan semakin luas pula, hal ini bertujuan menginformasikan kepada *stakeholders* terkait dengan tujuan dan kinerja yang akan dicapai, mengalihkan isu-isu penting yang lain, dan mengubah ekspektasi eksternal yang berhubungan dengan kinerja organisasi (Sembiring, 2003).

Agusti (2010) dan Sembiring (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Hal ini karena perusahaan besar merupakan emiten yang paling banyak

disoroti oleh publik sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Suhardjanto dan Miranti (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*. Oktafianti dan Rizki (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Penelitian di Malaysia Smith *et al.* (2007) serta Buniamin (2010) hasilnya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*.

Pengungkapan yang dilakukan perusahaan besar cenderung lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil sebagai wujud tanggung jawab perusahaan atas dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas eksplorasi, eksploitasi dan produksi. Perusahaan besar juga mengalami tekanan sosial dan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil karena aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan besar lebih disoroti oleh *stakeholders* (Patten, 1991). Maka dari itu, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemegang saham, perusahaan yang memiliki ukuran besar akan cenderung melakukan *environmental disclosures* yang lebih luas. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H_{4a} : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.

H_{4b} : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.

5. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Environmental Disclosures*

Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Hubungannya dengan pengungkapan adalah refleksi yang menunjukkan bahwa diperlukan respon sosial untuk membuat perusahaan memperoleh keuntungan. Dengan begitu dengan adanya *environmental disclosures* dipercaya sebagai pendekatan manajemen untuk mengurangi tekanan sosial dan merespon kebutuhan sosial (Hackston dan Milne, 1996).

Aulia dan Agustina (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih banyak ketika kemampuan menghasilkan labanya di atas rata-rata industri. Salah satu informasi yang akan diungkap oleh perusahaan adalah informasi lingkungan. Dengan menyajikan lebih banyak informasi maka akan semakin menunjukkan kesuksesan kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen.

Paramitha dan Rohman (2014) hasilnya bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*, pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut (Belkaoui dan Karpik, 1989). Suhardjanto dan Miranti (2009), menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*.

Penelitian dari Malaysia Alarussi (2009) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, maka manajemen akan menunjukkan kesuksesan kinerja yang dilakukannya. Hal itu karena profit yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan dan membuat manajer termotivasi untuk mengungkapkan informasi lebih banyak salah satunya informasi terkait lingkungan

Menurut Eljido-Ten (2004), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah, perhatian perusahaan terhadap lingkungan cenderung kurang. Kurangnya perhatian terhadap lingkungan tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah cenderung lebih fokus untuk memperbaiki kinerja ekonomi perusahaan. Kurangnya perhatian terhadap lingkungan ini tentu akan berdampak pada kurangnya tingkat *environmental disclosures*.

Menurut Oktafianti dan Rizki (2015), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, maka akan memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan *environmental disclosures*. Atas dasar pendapat tersebut, dapat diasumsikan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka tingkat *environmental disclosures* perusahaan juga akan tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H_{5a} : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.

H_{5b} : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.

6. Pengaruh Likuiditas Terhadap *Environmental Disclosures*

Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi artinya memiliki jumlah aset lancar yang lebih besar daripada hutang lancar. Hal ini merupakan sinyal positif bagi para *stakeholders* bahwa perusahaan dalam kondisi baik. Pada umumnya perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik akan memperkuat sinyal positif perusahaan kepada *stakeholders* dengan melakukan pengungkapan informasi tambahan termasuk *environmental disclosures*. Syahrir dan Suhendra (2010) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *CSR disclosures*. Penelitian ini akan menguji pengaruh likuiditas terhadap *environmental disclosures*.

Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan yang lain bahwa mereka lebih baik daripada perusahaan lain dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Maka dari itu, perusahaan terdorong untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Kamil dan Herusetya (2012) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosures* dalam hal ini adalah *CSR disclosures*. Hal ini karena kurangnya perhatian *stakeholders* yang berkepentingan terhadap informasi keuangan,

kurangnya memperhitungkan kualitas likuiditas entitas maka akhirnya tidak banyak memengaruhi luas pengungkapan sukarela yaitu *CSR disclosures*.

Daniel (2013) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan keuangan. Hal ini bahwa tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel.

Tingkat likuiditas mempunyai hubungan positif dengan luas pengungkapan. Kondisi perusahaan sehat dapat ditunjukkan dari tingkat likuiditas yang berhubungan dengan tingkat pengungkapan yang lebih. Hal ini didasarkan pada harapan bahwa kekuatan *financial* perusahaan akan cenderung memberikan pengungkapan yang lebih untuk memberikan informasi yang luas daripada perusahaan dengan kondisi *financial* lemah (Benardi *et al.*, 2009)

Iswandika *et al.* (2014), perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal bahwa mereka lebih baik daripada perusahaan lain. Sinyal ini ditunjukkan dengan melakukan berbagai aktivitas yang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan ini kemudian diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai *environmental disclosures*. Maka, dapat diasumsikan bahwa likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H_{6a} : Likuiditas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.

H_{6b} : Likuiditas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.

7. Perbedaan Tingkat *Environmental Disclosures* di Indonesia dan Malaysia

Dewasa ini, kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas perusahaan semakin marak terjadi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di seluruh penjuru dunia. Negara-negara maju umumnya memiliki sistem hukum yang tegas untuk meminimalisir hal tersebut. Dewasa ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia pun mulai meningkatkan upaya mereka dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara berkembang yang berada di wilayah yang sama yakni Asia Tenggara di mana telah diberlakukan ASEAN *Economic Community*. Diberlakukannya ASEAN *Economic Community* bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Besarnya harapan dan upaya untuk memajukan perekonomian harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, maka akan sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup (Putri, 2014)

Maka dari itu, selain masalah ekonomi, masalah tanggung jawab terhadap lingkungan hidup di kedua negara tersebut juga sangat penting untuk diperhatikan. *Environmental disclosures* sebagai tanggungjawab dalam pengungkapan lingkungan seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan setelah melakukan kegiatan operasinya. Sebab, masalah pencemaran lingkungan sudah serius dan harus segera diatasi oleh perusahaan untuk dapat mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat (Putri, 2015)

Realitanya, masih banyak perusahaan Indonesia dan Malaysia yang kurang memerhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pencemaran sungai dan kebakaran hutan di berbagai daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Papua merupakan salah satu bukti bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan di Indonesia masih cukup tinggi (Greenpeace, 2016). Secara tidak langsung hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan *environmental disclosures* di Indonesia masih membutuhkan perbaikan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Malaysia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Buniamin *et al.* (2011) menunjukkan bahwa pelaporan lingkungan di Malaysia masih rendah, maka perlu adanya perbaikan.

Walaupun sama-sama membutuhkan perbaikan, namun tingkat *environmental disclosures* di setiap negara pasti berbeda-beda. Kondisi sumber daya alam, ekonomi, dan perbedaan permasalahan lingkungan dan sosial yang berkembang di kedua negara bisa jadi alasan untuk menyatakan

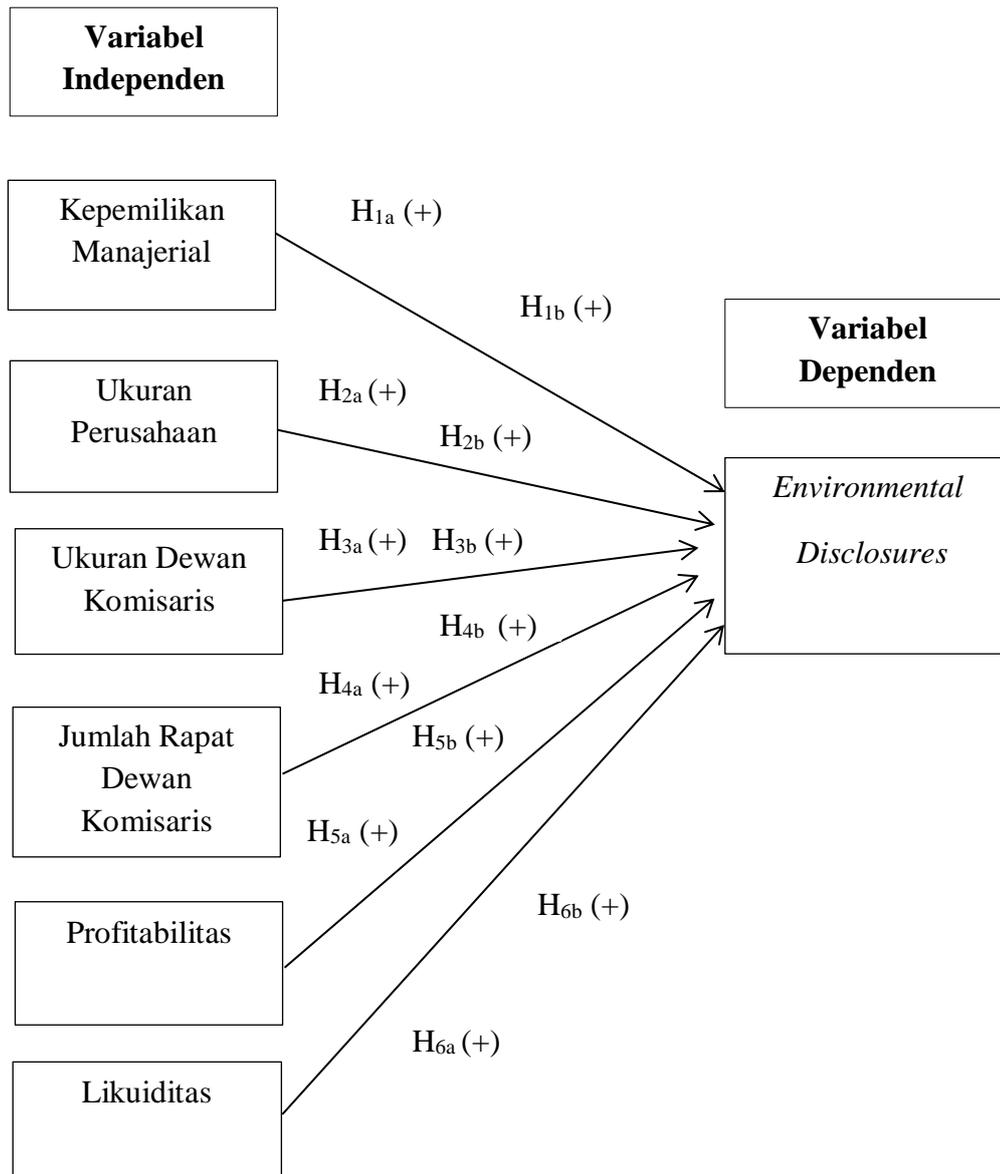
bahwa penerapan *environmental disclosures* di Indonesia dan Malaysia berbeda. Asumsi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat *environmental disclosures* di Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₇ : Terdapat perbedaan tingkat *environmental disclosures* di
Indonesia dan Malaysia.

C. Model Penelitian

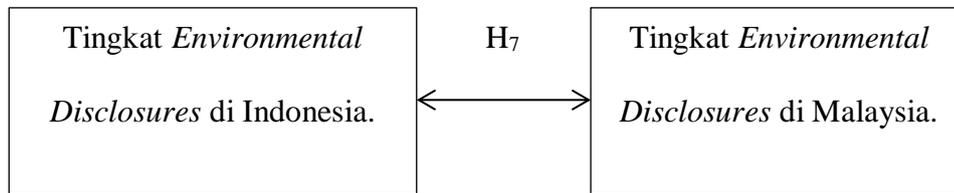
Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan Terhadap *Environmental Disclosures* di Indonesia dan Malaysia



Gambar 2.1

Model Penelitian 1

(Hipotesis 1-6)

Perbedaan Tingkat *Environmental Disclosures* di Indonesia dan Malaysia**Gambar 2.2****Model Penelitian 2****(Hipotesis 7)**